

## EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) STUDI PADA DESA KEMANGSEN KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

<sup>1</sup>Akhmad Rizal Zulvani Yahya, <sup>2</sup>Tjitjik Rahaju

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received Juli, 2025

Revised Juli, 2025

Accepted Juli, 2025

Available online Juli, 2025

[akhmadrizal.20052@mhs.unesa.ac.id](mailto:akhmadrizal.20052@mhs.unesa.ac.id)

*This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama*

### A B S T R A K

Lingkungan sehat merupakan kebutuhan setiap orang dan menetap di kawasan yang bebas dari kekumuhan adalah hak dari setiap orang. Negara perlu bertanggung jawab untuk memenuhi hal ini. Walaupun pada kenyataannya kawasan pemukiman kumuh merupakan masalah sosial berskala luas yang belum terselesaikan sampai saat ini. Pada tahun 2016 Kementerian PUPR melalui Direktorat Jendral Cipta Karya meluncurkan Program Kota Tanpa Kumuh atau yang lebih dikenal dengan Program KOTAKU untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Program KOTAKU bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh di Indonesia begitu juga di Kabupaten Sidoarjo termasuk kedalamnya dengan memberdayakan masyarakat dalam perbaikan program. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Kemangsen. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan teori evaluasi milik Dunn meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan,

responsivitas, dan ketepatan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh di Desa Kemangsen efektif dalam mengurangi kawasan kumuh. Program ini dinilai efisien dan responsif, meskipun masih ada kendala dalam pemerataan dan kecukupan tempat maupun aspek pelaksanaan program. Saran yang diberikan kepada pelaksana program adalah 1) Lebih merata lagi untuk pelaksanaannya 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan program.

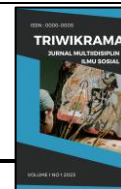
**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan, Kawasan Kumuh, Program Kotaku

### A B S T R A C T

*The healthy environment is the need of everyone and settles in the area that is free from slums is the right of everyone. The state needs to be responsible for fulfilling this. Although in reality the residential area is a broad -scale social problem that has not been resolved until now. In 2016 the Ministry of PUPR through the Directorate General of Cipta Karya launched a city without slums or better known as the Kotaku program to accelerate the handling of slums in Indonesia. The Kotaku program aims to reduce slums in Indonesia as well as in Sidoarjo Regency, including by empowering the community in improving programs. This study aims to describe the evaluation of the City without Slum Program (Kotaku) in Kemangsen Village. This descriptive qualitative research uses Dunn's evaluation theory including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Data collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed through collection data, data reduction, data presentation, and*

\*Corresponding author

E-mail addresses: [akhmadrizal.20052@mhs.unesa.ac.id](mailto:akhmadrizal.20052@mhs.unesa.ac.id)



*drawing conclusions. The results showed that the evaluation of the city without slums in Kemangsen Village was effective in reducing slums. This program is assessed Efficient and responsive, although there are still obstacles in equal distribution and adequacy of places and aspects of program implementation. The advice given to the program implementer is 1) more evenly distributed for its implementation, 2) Increase community participation for program sustainability.*

**Keywords:** Policy Evaluation, Slum Area, Kotaku Program

## 1. PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai pemukiman kumuh merupakan sebuah masalah global yang dihadapi oleh berbagai negara. Permasalahan ini bukan hanya terjadi pada kawasan pinggiran kecil melainkan perkotaan besar. Apalagi Indonesia yang merupakan negara berpenduduk terpadat nomor empat di dunia, dengan jumlah total populasi sekitar 281.603,8 juta penduduk.

Penduduk yang padat tidak terlepas dari adanya pertumbuhan penduduk, secara umum hal ini disebabkan oleh tingginya angka perpindahan penduduk dari desa ke kota atau sering disebut sebagai arus urbanisasi (Prayojana et al., 2020). Penduduk yang semakin bertambah disertai arus urbanisasi yang tinggi menyebabkan penyediaan sarana pemukiman menjadi semakin mendesak sehingga menjadi salah satu pemicu timbulnya permukiman kumuh (Christianingrum & Djumiarti, 2019).

Permukiman kumuh biasanya ditandai oleh tingginya kepadatan penduduk yang tinggal di suatu area tanpa memperhatikan standar kelayakan hunian. Menurut Berner (2007), kelayakan hunian dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar, sanitasi yang layak, ketersediaan air bersih, kekuatan bangunan, ruang tinggal yang cukup, serta jaminan bahwa tempat tinggal tersebut layak dihuni. Penanganan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat kelurahan/desa, serta masyarakat itu sendiri (Kamil, 2018).

Menurut Muta'ali & Nugroho (2019), terdapat sejumlah program yang telah dilaksanakan di Indonesia untuk menangani kawasan kumuh, salah satunya adalah Program KIP (Kampung Improvement Program). Selain itu ada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Program KOTAKU diperkenalkan secara resmi kepada pemerintah daerah di Jakarta pada 27 April 2016 (Devi & Herawati, 2017). Program Kotaku berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 mengenai rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019, yang menegaskan pentingnya pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan dengan fokus pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Program ini bertujuan untuk memperbaiki akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar di kawasan permukiman kumuh sekaligus mencegah terbentuknya pemukiman kumuh baru.

Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan rumah tidak layak huni sebesar 6,76 persen dari yang awalnya pada 2021 dikisaran angka 19,18 persen menjadi 25,94 persen pada 2022. Menurut data Badan Pusat Statistik, Sidoarjo merupakan kabupaten terkecil sekaligus terpadat di Jawa Timur, dengan kepadatan penduduk mencapai 2.916 jiwa per km<sup>2</sup> pada tahun 2020.

Kecamatan Balongbendo masuk dalam pelaksanaan program Kotaku. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada salah satu desa di Kecamatan Balongbendo yang telah menerima program Kotaku yakni Desa Kemangsen. Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan di lapangan oleh peneliti, masih terdapat beberapa kawasan yang terindikasi kumuh di wilayah Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo setelah diadakannya program tersebut. Hal ini terlihat dari masih adanya kawasan dengan terdapat jalan kurang layak dan adanya sampah di

jalanan. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya ketercakupan dalam pelaksanaan program KOTAKU di Desa Kemangsen maupun partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasannya tetap terlihat bersih dari banyaknya sampah dijalanan.



**Gambar 1. Kampung Lombok**

Program ini dijalankan dengan tujuan memberikan kesan penyegaran untuk kawasan tersebut sehingga dapat dijadikan kawasan wisata. Walaupun tentunya tidak lupa di kawasan lainnya di desa tersebut tetap diadakan perbaikan jalan maupun pembuatan sanitasi air bukan hanya pembentukan kawasan kampung lombok. Namun faktanya tingkat partisipasi masyarakat untuk melestarikan program ini dirasa kurang. Tentunya hal ini sangat disayangkan karena artinya program ini dalam hal manfaat dan berkelanjutan bisa dikatakan kurang karna tujuan awal pemilihan *beautifikasi* ini hanya dapat dilihat untuk sementara waktu saja.

Permasalahan ini mencerminkan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan Program Kotaku ini maupun perawatan setelah program dilaksanakan. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada tujuan berkelanjutan diadakan program ini yang mana untuk mengurangi kawasan kumuh. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan Program Kotaku di Desa Kemangsen.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

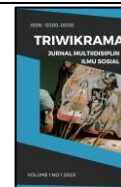
### **Kebijakan Publik**

Secara etimologis, istilah "kebijakan" atau *policy* berasal dari kata Yunani *polis* yang berarti negara atau kota. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "kebijakan" berasal dari kata "bijak", yang berarti menggunakan akal budi secara tepat, cerdas, dan terampil. Dalam bentuk kata benda, "kebijakan" dimaknai sebagai kepandaian, kemahiran, serta kebijaksanaan. Secara umum, kebijakan dipahami sebagai serangkaian prinsip, konsep, atau pedoman yang menjadi dasar dalam menyusun rencana, pelaksanaan tugas, kepemimpinan, serta pengambilan keputusan dalam pemerintahan, organisasi, dan berbagai konteks lainnya

Menurut Edward III dan Sharkansky dalam (Prabawati et al., 2020) mengartikan kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah untuk mengambil tindakan tertentu atau memilih untuk tidak bertindak sama sekali. Kebijakan publik merupakan kumpulan keputusan dan tindakan yang saling berhubungan, yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencapai tujuan

\*Corresponding author

E-mail addresses: [akhmadrizal.20052@mhs.unesa.ac.id](mailto:akhmadrizal.20052@mhs.unesa.ac.id)



tertentu.

### **Evaluasi Kebijakan**

Menurut William N Dunn (2003), menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penilaian, estimasi, dan penilaian nilai yang memiliki tujuan untuk menganalisis hasil kebijakan dalam konteks nilai. Evaluasi ini menghasilkan tuntutan evaluatif yang menantang dengan pertanyaan utama seputar nilai, seperti seberapa berharganya suatu kebijakan?. Evaluasi memegang peranan krusial dalam analisis kebijakan dengan beberapa fungsi utama. Pertama, evaluasi menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi membantu dalam memperjelas dan mengkritik nilai-nilai yang menjadi dasar pemilihan tujuan dan target kebijakan. Ketiga, evaluasi memberikan kontribusi pada penerapan berbagai metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan penyusunan rekomendasi.

Penelitian evaluasi adalah penggunaan metode penelitian sosial secara terstruktur yang memiliki tujuan untuk mengevaluasi konseptualisasi, desain, implementasi, dan kinerja suatu program intervensi sosial. Pendekatan ini mengaplikasikan metodologi penelitian sosial untuk menilai serta meningkatkan perencanaan, pemantauan, efektivitas, dan efisiensi berbagai program, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan layanan sosial lainnya.

Tahapan terakhir dalam siklus kebijakan publik adalah evaluasi. Hasil evaluasi ini kemudian memberikan rekomendasi normatif terkait kelanjutan kebijakan tersebut, apakah perlu dipertahankan, memerlukan perbaikan sebelum dilanjutkan, atau harus dihentikan sepenuhnya (Anggara, 2018).

### **Tujuan Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan memiliki tujuan untuk mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan terhadap masyarakat dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program tersebut diterapkan. Dalam proses evaluasi, penilaian keberhasilan program tersebut memerlukan penetapan kriteria untuk perbandingan yang akurat (Anggara, 2018).

Selain itu, evaluasi kebijakan bertujuan untuk mendapatkan data tentang bagaimana kebijakan diimplementasikan, menilai sejauh mana program tersebut sesuai dengan rencana awal dan bagaimana perubahannya, memberikan masukan kepada manajemen untuk meningkatkan atau menyempurnakan pelaksanaan, dan memberikan saran kepada pembuat kebijakan untuk keputusan selanjutnya terkait program di masa yang akan datang (Anggara, 2018).

### **Kriteria Evaluasi Kebijakan**

Terdapat enam indikator kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh William N Dunn (2003):

#### **a Efektivitas**

Efektivitas merupakan indikator yang memfokuskan perhatian pada sejauh mana suatu tindakan atau kebijakan dapat menghasilkan hasil yang diinginkan dan sejauh mana tujuan tersebut dapat terwujud. Dalam konteks evaluasi kriteria, efektivitas mencerminkan ukuran kesuksesan suatu program atau kebijakan, memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **b Efisiensi**

Efisiensi adalah parameter yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana usaha yang diterapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa efisien suatu proses dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks ini, efisiensi tidak hanya mengukur tingkat usaha yang diperlukan, tetapi juga sejauh mana hasil dari usaha tersebut dapat mencapai tingkat efektivitas tertentu. Dengan kata lain, efisiensi menjadi kunci dalam menentukan sejauh mana suatu kegiatan dapat mencapai tujuannya dengan meminimalkan pemborosan sumber daya dan mencapai hasil yang optimal

#### **c Kecukupan**

Kecukupan dalam konteks evaluasi mencakup penilaian terhadap pencapaian tujuan,



mengukur sejauh mana keberhasilan dianggap memadai dalam berbagai aspek. Evaluasi tersebut melibatkan pengukuran tingkat efektivitas untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, kecukupan tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan relevansi dari hasil yang telah dicapai. Dengan memperhatikan seberapa jauh tujuan mencerminkan pemenuhan kebutuhan dan nilai yang mendasarinya, evaluasi kecukupan menjadi suatu langkah yang penting dalam mengevaluasi efektivitas suatu tindakan atau kebijakan

**d Perataan**

Pemerataan menjadi indikator penting dalam evaluasi kebijakan, yang berperan dalam mengukur sejauh mana biaya dan manfaat telah didistribusikan secara adil di antara berbagai kelompok. Dalam konteks ini, pemerataan menilai keseimbangan alokasi sumber daya dan dampak positif yang mungkin timbul pada berbagai segmen masyarakat. Upaya untuk mencapai pemerataan yang optimal mencerminkan komitmen untuk menghindari disparitas yang tidak adil, sehingga kebijakan dapat memberikan manfaat secara merata kepada semua pihak yang terlibat. Evaluasi pemerataan membantu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan tertentu, tetapi juga menciptakan dampak positif yang adil dan seimbang di seluruh lapisan masyarakat.

**e Responsivitas**

Responsivitas merupakan aspek penting dalam evaluasi kebijakan publik yang mencakup tanggapan dari sasaran kebijakan terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan. Dalam konteks ini, responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan publik berhasil memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepentingan para penerima kebijakan. Tanggapan sasaran tersebut menjadi indikator utama untuk menilai apakah kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau apakah perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap responsivitas membantu pemerintah dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan publik demi mewujudkan keadilan dan keberlanjutan dalam pelayanan kepada masyarakat

**f Ketepatan**

Ketepatan dalam evaluasi kebijakan mencakup penilaian terhadap hasil kebijakan, terutama seberapa berhasil kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ketepatan tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan dalam mencapai tujuan, tetapi juga sejauh mana implementasi kebijakan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Dalam mengukur ketepatan, diperhatikan sejauh mana kebijakan memberikan dampak yang diinginkan, mengatasi masalah yang diidentifikasi, dan memberikan manfaat yang sesuai dengan harapan. Evaluasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana kebijakan dapat dianggap berhasil dan relevan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

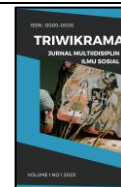
## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berakar pada filosofi postpositivisme, menjadi pendekatan utama dalam mengeksplorasi kondisi objek alam. Penelitian ini dilakukan di Desa Kemangsen. Fokus penelitian dalam konteks ini terkait dengan evaluasi program kota tanpa kumuh di Kabupaten Sidoarjo dengan lokasi terfokus di Desa Kemangsen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data. Sumber data primer diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung di Kantor Kepala Desa Kemangsen. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari literatur-literatur terkait, dokumen-dokumen, dan

\*Corresponding author

E-mail addresses: [akhmadrizal.20052@mhs.unesa.ac.id](mailto:akhmadrizal.20052@mhs.unesa.ac.id)





sumber-sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti, pedoman wawancara, peralatan penunjang seperti handphone untuk merekam dan memfoto, serta alat tulis dan buku catatan kecil. Dalam rangka penelitian ini, beberapa teknik pengumpulan data digunakan, di antaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman (2014) dan dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **Gambaran Umum Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Desa Kemangsén**

Kemangsén merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan dana utama program KOTAKU sebesar 1 miliar rupiah. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan kawasan berupa jalan beserta saluran drainase pada Rt:11 Rw:4 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan beserta gaji yang akan diberikan untuk para pekerja yang terlibat dalam proyek ini. Adapun proyek lainnya adalah pengadaan pot beserta tanamannya maupun lampu penanda adanya kawasan kampung lombok.

Sebagai bagian dari intervensi komprehensif, tim Kotaku melakukan pembangunan tiga ruas jalan strategis di Desa Kemangsén. Dua dari jalan tersebut mendapat perhatian khusus dilengkapi dengan sistem drainase berupa saluran got beserta tutupnya untuk mencegah genangan air. Kesemua jalan dioptimalkan dari sisi konektivitas, sehingga semua akses warga menjadi lebih dapat diandalkan .

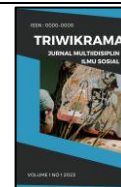
Pemasangan drainase pada dua ruas jalan tersebut dirancang secara sistematis, mampu menampung limpasan air hujan sekaligus mengurai potensi banjir lokal. Ini signifikan karena membantu menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui air tergenang, dan menjaga kenyamanan warga saat musim hujan. Drainase ini juga merupakan salah satu dari tujuh indikator kualitas permukiman yang diukur oleh Kotaku .

Selain intervensi infrastruktur, program menyertakan aspek estetika dan pemberdayaan lokal dengan menyediakan pot-pot tanaman lombok (cabai) yang ditanam di sepanjang ruas jalan yang dibangun. Dalam bingkai branding komunitas, pemilihan tanaman lombok bukan hanya memperindah lingkungan, tapi juga menjadi identitas khas sebagai “Kampung Lombok”. Pot-pot tersebut menambah nuansa hijau dan produktif, menghubungkan ruang publik dengan kegiatan ekonomi lokal. Lebih lanjut, program menambahkan lampu box (neonbox) sebagai penanda visual untuk “Kampung Lombok”. Lampu ini dipasang di titik-titik strategis, seperti persimpangan utama dan sepanjang ruas jalan dengan lebar terbesar dalam pelaksanaan program. Fungsinya bukan hanya sebagai penerangan malam hari, tetapi juga simbol kuat yang menunjukkan identitas kawasan memberi kesan menyambut dan mengundang, sekaligus menambah nilai estetika lingkungan sekitar.

Kolaborasi program KOTAKU di Desa Kemangsén dilakukan oleh pemerintah daerah, perangkat desa, kelompok masyarakat, dan warga bersama terlibat langsung dalam perencanaan, implementasi sampai perawatan. Hal ini memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar mendukung kebutuhan lokal dan mudah diterima warga. Dampak nyata terlihat dari akses transportasi yang lebih mudah, lingkungan yang lebih tertata, kualitas drainase yang lebih baik, serta munculnya identitas komunitas yang kuat melalui Kampung Lombok.

##### **Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh di Desa Kemangsén**

Pada proses evaluasi program ini, digunakan kriteria evaluasi yang diadaptasi dari William N. Dunn sebagai alat ukur pelaksanaan Program KOTAKU di Desa Kemangsén hingga saat ini.



#### a. Efektivitas

Efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sasaran operasional yaitu Perbaikan Infrastruktur, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah, dan Pencegahan Kumuh Baru.

Intervensi infrastruktur difokuskan secara strategis berdasarkan hasil baseline awal, sehingga jalan, maupun drainase menyasar lokasi paling kritis di desa. Strategi ini memperlihatkan efektivitas program dalam mengalokasikan sumber daya ke area kumuh prioritas, sesuai prinsip efisiensi dalam melakukan intervensi. Pendekatan swakelola masyarakat melalui padat karya atau cash for work (CFW) secara efektif tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga meningkatkan keterlibatan warga. Hal ini memperkuat hubungan antara efektivitas fisik dan sosial program, karena warga turut aktif dalam pembangunan meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan.

Kemajuan infrastruktur juga berpengaruh nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Paving jalan dan perbaikan drainase berhasil mengatasi banjir lokal, sehingga akses masyarakat ke layanan dan mobilitas harian meningkat, sebagai hasil langsung dari program ini.

#### b. Efisiensi

Efisiensi merujuk pada kemampuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia seperti sumber daya waktu, sumber daya uang, sumber daya tenaga kerja yang minimal untuk mencapai tujuan dan hasil yang maksimal. Dalam pelaksanaannya program KOTAKU memiliki sejumlah personel atau sumber daya manusia yang bertugas.

Program KOTAKU menerapkan sistem padat karya tunai dengan dana berbasis Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat (BPM). Di Desa Kemangsen dialokasikan sebesar Rp 1 miliar untuk perbaikan infrastruktur, pendanaan ini nantinya akan masuk ke rekening organisasi KSM secara bertahap. Model ini menunjukkan efisiensi karena dana karena langsung masuk ke masyarakat dan dipergunakan untuk pekerjaan konstruksi ringan yang sesuai kebutuhan lokal yang telah disepakati.

Melalui swakelola LKM/BKM/KPP desa membuat penggunaan tenaga lokal langsung, bukan kontraktor eksternal. Ini tidak hanya menekan biaya berlebih, tetapi juga meningkatkan kecepatan pengerjaan, keterlibatan warga, dan kepemilikan lokal terhadap proyek.

Dengan memilih Desa Kemangsen sebagai salah satu desa prioritas untuk mendapatkan pendanaan 1 miliar dengan 3,9 ha kawasan kumuh, program menunjukkan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya. Fokus pada titik kritis berdasarkan data baseline memastikan bahwa dana, tenaga, dan waktu diarahkan ke lokasi yang paling membutuhkan.

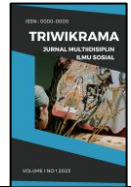
Dalam prosesnya semua pendanaan juga dilakukan secara terbuka oleh semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan program. Hal ini menjaga budget tetap fokus dan integratif karena setiap pemangku kepentingan bekerja sesuai tanggung jawab menghindari tumpang tindih tugas dan pemborosan waktu maupun biaya. Dana diarahkan langsung ke pembangunan lingkungan fisik dan pekerja lokal. Dengan model ini memastikan dana publik digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sepanjang proses. Efisiensi juga tercermin dari pengerjaan infrastruktur fisik dalam kerangka waktu tepat sasaran. Sistem pengawasan melalui lokakarya desa dan pelaporan berkala memungkinkan pengambilan keputusan cepat jika terjadi hambatan, menjaga jalannya proyek agar tetap sesuai target. Hal ini memastikan timeline efisiensi tercapai.

#### c. Kecukupan

Kecukupan dalam program KOTAKU sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada

\*Corresponding author

E-mail addresses: [akhmadrizal.20052@mhs.unesa.ac.id](mailto:akhmadrizal.20052@mhs.unesa.ac.id)



masyarakat diwilayah yang tergolong kumuh. Kecukupan Program merujuk pada sejauh mana program KOTAKU mencakup seluruh kebutuhan aspek infrastruktur yang ditetapkan seperti jalan, drainase, sanitasi, rumah layak, manajemen sampah, dan proteksi kebakaran.

Perbaikan jalan lingkungan secara substansial telah selesai, mencakup hampir semua titik kritis yang sebelumnya rusak dan mengalami genangan di kawasan desa. infrastruktur jalan selesai dengan baik dan layak digunakan, bahkan saat memasuki musim hujan menunjukkan hasil yang memuaskan. Drainase lingkungan yang dibangun di sepanjang jalan paving juga mencerminkan komitmen terhadap kecukupan program. Sistem ini efektif menangani aliran air, mengurangi potensi banjir kecil dan genangan di lintasan desa, sehingga fungsi jalan dapat tetap optimal.

Proteksi kebakaran, untuk ini belum terlihat di kawasan desa ketika peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan. Hal ini tentunya perlu ditingkatkan di daerah lain untuk kedepannya. Bisa dengan hal kecil dahulu meski belum berupa hydrant atau pompa besar, dipenuhi melalui edukasi masyarakat dan penyusunan jalur evakuasi serta akses pemadam ringan..

Namun, dalam hal kecukupan masih menemui kendala dalam hal pengelolaan sampah ketika peneliti berkeliling disekitar tempat tersebut masih banyak sampah ditempat-tempat terbuka. Jadi untuk pengolahan sampah masih kurang dan perlu ditingkatkan. Keberadaan administrasi lahan eksternal seperti area milik perseorangan/pribadi yang sekarang secara sementara dipakai sebagai jalan untuk warga setempat mengakibatkan beberapa segmen wilayah kumuh masih belum disentuh.

#### d. Perataan

Perataan bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan Program Kotaku ini didistribusikan secara adil sehingga setiap masyarakatnya mendapatkan akses yang sama dan setara. Berdasarkan informasi dari sekretaris desa terkait akses masyarakat terhadap hasil dari program KOTAKU di Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo sudah disebarkan sesuai dengan ketentuan pada SK yang berlaku bahwasannya untuk Desa Kemangsen pelaksanaan program dilakukakan pada kawasan RT:11, RW:4.

Di Kecamatan Balongbendo, yakni Desa Kemangsen, terpilih sebagai satu dari 5 desa prioritas di Kabupaten Sidoarjo. Langkah ini dilakukan setelah penilaian kawasan kumuh menggunakan data SK Bupati, survei baseline, dan pertimbangan wilayah kumuh. Perataan dalam konteks Program KOTAKU berarti bahwa setiap intervensi harus tersebar merata di seluruh wilayah desa sasaran, tanpa mengutamakan satu area saja.

Namun dalam hal ini memang sesuai kesepakatan bersama berdasarkan musyawarah dan SK yang berlaku dana program (APBN) untuk KOTAKU senilai Rp1 miliar ini difokuskan pada pembangunan di wilayah paling terdampak di desa ini. Oleh karena itu salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya program ini adalah para warga dari kawasan RT/RW lain yang tidak terdampak program dan merasa wilayahnya perlu perbaikan merasa kurang adil.

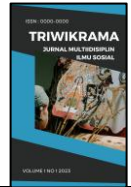
Walaupun pelaksanaan padat karya dan swakelola melibatkan masyarakat tidak hanya dari RT:11 RW:04 tapi juga dari RW maupun dusun lain, tapi pengerjaan program hanya di kawasan kumuh terpusat desa. Selain itu, setiap desa atau kelurahan ditargetkan untuk mengerahkan tenaga kerja yang memenuhi kriteria sebagai kelompok sasaran dalam Program KOTAKU. Hal ini memicu adanya rasa iri pada warga lain yang merasa wilayahnya perlu perbaikan selain itu, terdapat dampak negatif lain yaitu sebagian warga desa tidak dapat ikut menjadi tenaga kerja dalam program ini karena keterbatasan kuota yang telah ditetapkan oleh pelaksana utama.

Secara keseluruhan, maka perataan dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kemangsen bisa dibilang kurang merata. Namun walaupun demikian manfaat nyata juga sangat terlihat dengan adanya jalan, drainase, dan fasilitas lingkungan lain dapat dirasakan semua masyarakat.

#### e. Responsivitas

Responsivitas merujuk pada seberapa cepat suatu program merespon kebutuhan atau





kendala dari suatu kelompok tertentu. Responsivitas sangat penting dalam pelaksanaan program KOTAKU karena pihak pelaksana ditingkat desa tentunya masih membutuhkan bantuan dari pihak terkait selama melaksanakan program ini maupun setelah program selesai.

Responsivitas mencerminkan kemampuan program merespons kebutuhan dan tantangan lapangan secara cepat dan tepat. Di Desa Kemangsen, responsivitas terlihat dari pelaksanaan lokakarya dan pelaporan rutin. Fasilitator teknis dan desa aktif menyelenggarakan monitoring untuk mengevaluasi progres dan hambatan implementasi.

Pelaksanaan keputusan terkait Program KOTAKU dilakukan dengan cermat oleh pelaksana utama, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta para pemangku kepentingan lainnya. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, dalam pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen dari PUPR Sidoarjo juga mencatat adanya pengendalian secara berkala melalui laporan pelaksanaan program yang melibatkan berbagai pihak secara kolaboratif.

Selain itu, respon terhadap isu sosial dan ekonomi warga cukup baik. Pada waktu program ini dilaksanakan berdekatan dengan pandemi COVID-19, untuk menunjang berbagai kebutuhan masyarakat akhirnya program padat karya segera diadaptasi untuk menyerap tenaga lokal melalui Prosedur Operasional Standar (POS) Program KOTAKU tahun 2021 yang menunjukkan kemampuan adaptif program terhadap kondisi darurat masyarakat.

#### f. Ketepatan

Ketepatan berfungsi untuk memastikan bahwa program KOTAKU diberikan tepat sasaran pada wilayah kumuh dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan program KOTAKU di Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam prosesnya pengerjaan infrastruktur seperti jalan dan drainase mengacu pada dokumen teknis (RPLP/DED/RAB), yang kemudian diverifikasi oleh fasilitator dan satker PUPR sehingga kesesuaian teknis program sangat tinggi. Dengan pengalokasian dana BPM Rp 1 miliar kepada Desa Kemangsen yang nantinya diserahkan ke KSM Kemangsen yang ditunjuk sesuai prosedur menghindari penyaluran tidak tepat guna.

Meskipun sudah tepat sasaran, beberapa wilayah kumuh yang termasuk dalam program ini adalah lahan milik eksternal bukan lahan desa seperti milik pribadi jadi belum tersentuh karena kendala akses dalam memanfaatkan lahan tersebut. hal ini menandakan masih ada ruang untuk menambah ketepatan pelaksanaan.

Penerapan standar ketepatan ini membuktikan bahwa Desa Kemangsen menjadi desa yang tepat mendapat bantuan BPM tahun 2021 sebagai bentuk kepatuhan pada pedoman KOTAKU. Secara keseluruhan, Program KOTAKU di Desa Kemangsen menunjukkan tingkat ketepatan sangat baik: intervensi fisik, skema pendanaan, dan mekanisme partisipasi sosial dilaksanakan sesuai aturan, dokumen teknis, dan kebutuhan nyata wilayah kumuh.

## PEMBAHASAN

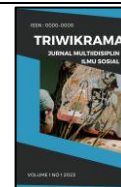
Desa Kemangsen merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Balongbendo yang telah terpilih untuk mengadakan Program Kota Tanpa Kumuh. Dalam menganalisis kinerja pelaksanaan Program KOTAKU di Desa Kemangsen peneliti menggunakan kriteria evaluasi yang disusun berdasarkan kriteria evaluasi menurut William N. Dunn.

#### a. Efektivitas

Efektivitas dalam evaluasi kebijakan publik berkaitan dengan seberapa sukses suatu program atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan (Dunn, 2003). Pada pelaksanaan Program

\*Corresponding author

E-mail addresses: [akhmadrizal.20052@mhs.unesa.ac.id](mailto:akhmadrizal.20052@mhs.unesa.ac.id)



Kota Tanpa Kumuh di Desa Kemangsren Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui apakah hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk mengurangi kawasan kumuh di desa kemangsren dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah maupun terdampak Covid-19 untuk meningkatkannya ekonominya. Selain itu juga untuk memaksimalkan lembaga yang tingkat desa agar lebih maksimal dengan memberdayakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) dalam pelaksanaan dan keberlanjutan program.

Berdasarkan hasil tersebut tujuan yang selama ini dijalankan sesuai dengan tujuan Program Kota Tanpa Kumuh pada SE DJCK No 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program diawali dengan tahap pra-konstruksi, yaitu pembongkaran infrastruktur yang ada, kemudian dilanjutkan dengan proses pembangunan atau perbaikan terhadap infrastruktur yang mengalami kerusakan. Pada tahapan ini, tenaga kerja melaksanakan kegiatan pembangunan dengan pendampingan dari tim fasilitator yang terdiri dari tenaga ahli di bidang teknik, sehingga proses konstruksi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, kegiatan ini akan dipantau dan dievaluasi oleh Dinas PUPR. Untuk tahap keberlanjutan, Dinas PUPR akan melakukan kunjungan ke sejumlah desa atau kelurahan guna melakukan pengawasan terhadap infrastruktur yang telah diperbaiki.

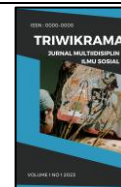
Berdasarkan temuan peneliti secara keseluruhan efektivitas pelaksanaan program berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah cukup efektif dalam pelaksanaannya walaupun untuk tanaman lombok kemudian tidak terawat dan mati sehingga untuk disebut kawasan kampung lombok sekiranya agak kurang layak untuk sekarang.

Awalnya konsep kampung lombok ini bertujuan untuk kemandirian ekonomi masyarakat sekitar jadinya gagal karna kurang terawat dengan partisipasi masyarakat yang kurang dalam perawatannya jadi tergolong sia-sia dalam pengadaan pot beserta benih tanamannya dan lampu jalan identitas kampung lombok ketika tidak bisa dilihat lagi sebagai kawasan kampung lombok. Walaupun pada akhir tahun 2024 lalu Desa Kemangsren mendapatkan bantuan pengadaan bibit cabai, tomat dan terong dari Polsek Balongbendo untuk diolah dalam rangka mewujudkan swasembada pangan mandiri. Namun, nyatanya juga tidak berhasil lagi dan tumbuhan mayoritas mati hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat kurang dalam pelestarian program yang sudah dijalankan ataupun kurangnya sosialisasi pengendalian dan pendampingan dari pihak yang lebih paham mengenai tanaman ini. Terlepas dari kampung lombok untuk pengerjaan infrastruktur berjalan dengan baik dan sangat efektif karna sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengubah wilayah yang sebelumnya sering tergenang air banjir ketika hujan dengan dibuatkan got saluran air sudah mengurangi genangan air begitujuga dengan jalan yang sangat membantu akomodasi warga sekitar dalam beraktifitas.

#### **b. Efisiensi**

Efisiensi adalah ukuran sejauh mana penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan dalam mencapai hasil yang diharapkan (Dunn, 2003). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darmawan selaku Sekertaris Desa disimpulkan bahwa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Desa telah menyediakan personel atau sumber daya manusia yang diperlukan untuk pelaksanaan program.

Selain personel atau sumber daya manusia, Program KOTAKU memiliki alokasi anggaran bantuan yang telah ditetapkan untuk menjalankan program. Desa kemangsren mendapat alokasi dana tersebut sebesar 1 miliar rupiah yang penyerahannya dilakukan secara bertahap melalui 2 tahapan. Tahap pertama 70% (termin 40% + 30% ketika laporan sudah terlihat progres fisik diatas



25%) kemudian dilanjutkan sisa 30% lainnya ketika progres fisik sudah diatas angka 50% selesai dengan prosedur penyusunan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh PPK yang dilanjutkan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pusat Pembendaharaan Negara (KPPN). Dana bantuan tersebut langsung ditransfer ke rekening LKM/BKM/KSM ditingkat desa agar bisa langsung dimanfaatkan . Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darmawan menyataknn bahwa dalam pelaksanaannya semua dana aman dan tidak ada kendala sama sekali.

Dalam hal efisiensi waktu program dijalankan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan pada saat sosialisasi awal jadi semuanya proyek juga terkendali dengan aman dan dapat selesai dengan baik. Berdasarkan hasil temuan peneliti, evaluasi pada kriteria efisiensi dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Desa Kemangsén menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Sumber daya manusia yang terlibat dalam program, sumber daya anggaran yang dialokasikan telah berjalan dengan efisien. Para masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi juga terkait adanya program. Selain itu, SDM yang terlibat juga telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya dengan baik, memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, pelaksanaan Program KOTAKU di Desa Kemangsén telah efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan program dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

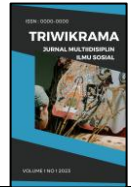
#### c. Kecukupan

Kecukupan merupakan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah (Dunn, 2003). Peneliti mengukur kecukupan dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Desa Kemangsén Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek sebagai yaitu (1) Kondisi Bangunan Gedung, (2) Kondisi Jalan Lingkungan, (3) Kondisi Penyediaan Air Minum, (4) Kondisi Drainase Lingkungan, (5) Kondisi Pengelolaan Air Limbah, (6) Kondisi Pengelolaan Persampahan, dan (7) Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran.

Pelaksanaan Program KOTAKU di Desa Kemangsén Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo , dalam aspek kecukupan pengadaan fasilitas sesuai dengan 7 aspek diatas masih belum terpenuhi untuk kesemua aspeknya Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa, dan observasi langsung oleh peneliti bahwasannya untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh program hanya pada 2 asepek dari ke 7 aspek tersebut. Aspek yang diadakan disini ialah pembangunan jalan beserta drainase lingkungan sedangkan untuk ke 5 aspek lainnya hampir tidak terlihat secara fisik. Hanya dilakukakn sosialisasi pennanganan kebakaran tanpa pengadaan seperti alat pemadam api ringan. Mungkin ini bisa diakomodasi untuk pengadaannya pada saat program dilakukan.

Pengelolaan sampah, untuk ini mungkin kalau dengan dana yang ada tidak bisa dibuatkan Tempat Penampungan Sementara (TPS) maka seharusnya memang dibuatkan bak bak sampah dengan jarak tertentu agar tidak terlihat banyak sampah disamping jalan. Walaupun sebenarnya dalam plakat program KOTAKU diberikan keterangan pengadaan gerobak sampah tapi tidak terlihat dan tidak disebutkan juga oleh aparat desa terkait. Hal ini semakin kurang apabila menyatakan sebagai kawasan kampung lombok tapi pengolahan persampahannya masih kurang.

Untuk aspek lainnya secara letak wilayah memang belum tergolong kawasan yang terlalu bermasalah karena di RT:11 RW:04 tidak terlalu banyak atau bahkan tidak ada pabrik sekala besar hanya UMKM untuk penanganan limbahnya. Hal ini bisa dilakukakn dengan sosialisasi saja tanpa adanya intervensi fisik. Dalam aspek penyediaan air minum layak sudah terpenuhi karna memang kawasan tersebut bukan daerah yang kurang akan air. Begitupulah dengan bagunan karna kondisinya masih dirasa baik jadi memang lebih dibutuhkan adalah pembagunan jalan dan



drainase air.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti secara keseluruhan kecukupan dalam pelaksanaan Program KOTAKU berdasarkan ke 7 aspek yang telah disebutkan diatas sudah terpenuhi untuk tingkatan yang paling kritis dengan pembangunan jalan dan drainase. Namun, tentunya masih banyak hal yang perlu diperhatikan pada beberapa aspek lainnya. Kedepannya agar lebih dicukupkan dalam setiap aspek yang ditetapkan sebagai indikator kawasan kumuh terlebih dahulu dalam upaya mengurangi kawasan kumuh supaya terpenuhi dengan baik.

#### d. Perataan

Perataan merujuk pada pendistribusian manfaat program yang merata pada kelompok penerima untuk memastikan bahwa manfaat program telah didistribusikan secara adil dan seimbang sehingga tidak ada kelompok yang terlalu diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil (Dunn, 2003). Peneliti mengukur pemerataan dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Desa Kemangsren Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan berdasar pada perataan persebaran diadakannya program ini dan manfaat yang didapatkan oleh seberapa banyak warga selama maupun setelah diadakannya pogram ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa mengenai perataan pelaksanaan program KOTAKU masih ada beberapa kalangan masyarakat yang merasa kurang mendapat perhatian ataupun iri. seperti yang dijelaskan oleh bapak Darmawan walaupun pelaksanaan padat karya dan swakelola melibatkan masyarakat tidak hanya dari RT:11 RW:04 tapi juga dari RW maupun dusun lain, tapi pengerjaan program hanya di kawasan kumuh terpusat desa. Tentunya hal ini harus diatasi dengan melakukan sosialisasi berupa pengertian kepada warga dikawasan yang tempatnya belum terpilih untuk menerima bantuan perbaikan dalam pelaksanaan program ini. Tentunya berharap kedepannya akan diadakan lagi program seperti ini agar menjangkau lebih banayak kawasan secara merata.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan perbaikan kawasan kumuh dengan melibatkan tenaga kerja yang diberikan upah. Sasaran utama dari program ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, pada tahun 2021, sasaran program diperluas oleh pelaksana utama untuk mencakup masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di wilayah pelaksanaan program, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan, menganggur, mengalami penurunan pendapatan, serta pencari nafkah utama dalam keluarga baik laki-laki maupun perempuan, dengan ketentuan bukan anak di bawah umur.

Meskipun demikian, penetapan kelompok sasaran di setiap desa atau kelurahan hanya melibatkan tenaga kerja yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan Program KOTAKU. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan warga lain yang merasa bahwa wilayah mereka juga membutuhkan perbaikan. Selain itu, masih terdapat dampak negatif lainnya, yaitu sebagian warga tidak dapat berpartisipasi sebagai tenaga kerja dalam program ini karena keterbatasan kuota yang telah ditetapkan oleh pelaksana utama. Oleh karena itu, sebagai bahan evaluasi ke depan, disarankan agar kuota tenaga kerja dapat ditingkatkan sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat program ini.

Berdasarkan hasil temuan peneliti evaluasi terkait pemerataan dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Desa Kemangsren Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo masih perlu ditingkatkan lagi. Walaupun demikian ini menunjukkan bahwa manfaat pekerjaan, seperti lapangan kerja dan akses fisik dirasakan secara nyata oleh warga Desa Kemangsren.

#### e. Responsivitas

Responsivitas merujuk pada kepuasan kelompok tertentu terhadap hasil kebijakan yang telah dibuat (Dunn, 2003). Responsivitas dalam pelaksanaan program KOTAKU di Desa Kemangsren Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo peneliti mendefinisikan dalam hal kepuasan





masyarakat terhadap program ini selama pelaksanaan maupun hasil yang dicapai.

Di Desa Kemangsen, responsivitas juga terlihat dari pelaksanaan lokakarya dan pelaporan rutin kepada dinas PUPR. Para fasilitator teknis dan pihak desa juga aktif menyelenggarakan monitoring untuk mengevaluasi progres dan hambatan selama pelaksanaan program. Karena selama program ini berlangsung akan terus dikontrol oleh Dinas PUPR dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat sampai pada KSM Desa Kemangsen. Hal ini menghasilkan keputusan yang baik secara teknis maupun non teknis berjalan lancar dan dapat dipertanggung jawabkan

Jadi dari segi pelaporan selama pelaksanaan program semua berjalan lancar tanpa ada kendala berarti. Program ini waktu dijalankan bertepatan dengan Covid-19 jadi sebagai bentuk respon guna mencapai kepuasan dan hasil yang maksimal dalam pengentasan kawasan kumuh. Diterbitkanlah Prosedur Operasional Standar (POS) Program KOTAKU tahun 2021 yang menunjang isu sosial dan ekonomi warga untuk berbagai kebutuhan masyarakat akhirnya program padat karya segera diadaptasi untuk menyerap tenaga lokal dalam pelaksanaan program supaya masyarakat terdampak pandemi covid dan berpenghasilan rendah bisa merasakan manfaatnya terutama yang berada di kawasan kumuh tersebut. Hal ini menunjukkan kemampuan adaptif program terhadap kondisi darurat masyarakat guna mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan pengamatan peneliti, responsivitas dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo menunjukkan pencapaian yang baik. Para masyarakat di kawasan program dilaksanakan merasa sangat terbantu. Lebih lanjut, tanggapan terhadap keluhan dari warga lain juga dilakukan dengan cepat dan tanggap oleh pelaksana tugas. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dari KSM maupun aparat desa pendamping program dalam menangani permasalahan yang muncul.

#### f. Ketepatan

Ketepatan dalam konteks program kebijakan menandakan bahwa tujuan yang diinginkan dari program tersebut benar-benar memberikan manfaat yang berguna dan bernilai (Dunn, 2003). Dalam pelaksanaan program KOTAKU di Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan pernyataan Sekdes bahwa pelaksanaan dilakukan ditempat paling utama dan relevan untuk mendapat bantuan. Dalam pelaksanaannya program membangun ulang jalan yang memang kurang layak dan membangun saluran air disampingnya. Hal ini dilakukan karena ketika hujan datang di kawasan tersebut sering tergenang air, dengan membongkar ulang semua jalan lama yang tidak layak dan diganti dengan baru maka hasilnya akan lebih optimal dan bertahan lama. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa penetapan program ini disini sudah tepat karena memang membutuhkan bantuan dana untuk perbaikan.

Evaluasi program bergantung pada ketepatan dalam penggunaan dana bantuan, karena ini merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan tingkat ketepatan program tersebut. Dengan kata lain, cara dana bantuan digunakan memegang peranan penting dalam menilai kriteria ketepatan program. Dengan pengalokasian dana BPM Rp 1 miliar kepada Desa Kemangsen yang nantinya diserahkan ke KSM Kemangsen. Dana tersebut terserap semua untuk proyek yang ada selama kegiatan berlangsung terutama dalam memberikan upah pada para pekerja serta pengadaan barang sesuai kebutuhan yang telah ditentukan dalam rancangan.

Meskipun sudah tepat sasaran, beberapa wilayah kumuh yang termasuk dalam program ini adalah lahan milik eksternal seperti milik pribadi yang dipakai sebagai jalan penghubung sementara bukan lahan desa. Penerapan standar ketepatan ini membuktikan bahwa Desa Kemangsen menjadi desa yang tepat mendapat bantuan BPM tahun 2021 sebagai bentuk





kepatuhan pada pedoman KOTAKU Secara keseluruhan, Program KOTAKU di Desa Kemangsén menunjukkan tingkat ketepatan sangat baik.

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program KOTAKU telah berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan efektivitas yang tinggi. Program ini berhasil memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kondisi kawasan kumuh di Desa Kemangsén, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, melalui berbagai kegiatan peningkatan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat. Hingga program berakhir, Desa Kemangsén tercatat telah berhasil mengurangi luas kawasan kumuh sebesar 3,9 hektar. Selain itu, Program KOTAKU juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan warga dengan melibatkan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan pembangunan, yang secara langsung memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat terdampak selama proses kegiatan berlangsung.

Berdasar pada hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh di Desa Kemangsén Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, maka dapat disimpulkan bahwa program ini efektif dalam mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meskipun demikian, masih ada beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti kepemilikan tanah diluar kuasa desa maupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemberdayaan program yang sudah disediakan. Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya dalam program ini dinilai sudah efisien. Pemerataan kawasan terdampak bisa ditingkatkan agar tidak terpusat. Responsivitas program terhadap kebutuhan masyarakat sudah baik. Selain itu, untuk ketepatan sudah sangat tepat dilakukan dikemangsén karena memang membutuhkan.

##### **Saran**

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam evaluasi Program Kotaku di Desa Kemangsén Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerataan perlu disebar lebih banyak di wilayah yang belum menerima manfaat program mengingat masih terdapat banyak desa ataupun wilayah kumuh lain di desa yang sama yang belum melaksanakan program Kotaku
2. Pengoptimalan program dengan lebih berfokus pada perbaikan infrastruktur skala lingkungan seperti sarana pengelolaan sampah ataupun penyediaan bak sampah
3. Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan program yang sudah ada. Bisa dilakukan dengan pengadaan sosialisasi berkala ataupun pengecekan berkala oleh pihak terkait supaya tetap terawat hasil dari program Kotaku ini.
4. Perlunya pendampingan lebih lanjut oleh pihak berwenang ketika dikawasan yang teridentifikasi kumuh merupakan tanah milik eksternal atau diluar kuasa pelaksanaan program. Supaya lebih optimal dalam pelaksanaannya dan bisa dilakukan pengerjaan di area tersebut baik melalui MoU, perjanjian pinjam pakai maupun leasing jangka panjang.



## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia.
- Berner, E. (2007). *Of slums and gated communities: Failure of formal and informal land markets in developing cities. Paper presented at the ISS/ Development and Change Symposium 'Cities of Extremes', The Hague, 15th - 16th October 2007.*
- Christianingrum, S. I., & Djumiarti, T. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 88-105.
- Devi, C. M., & Herawati, N. R. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan (Di Desa Gambiran Dan Desa Mancilan Di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Jawa Timur Tahun 2014-2016). *Journal of Politic and Government Studies*, 6(3), 601-610.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Administrasi Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Kamil, I. (2018). Peran Komunikasi Pemerintahan dalam Penanganan Lingkungan Kumuh. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 129-139.
- Miles, M., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Edition 3)*. SAGE Publications.
- Muta'ali, L., & Nugroho, A. R. (2019). *Permukiman kumuh di Indonesia dari masa ke masa: perkembangan program penanganan*. UGM PRESS.
- Prabawati, I., Rahaju., T., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Unesa University Press.
- Prayojana, T. W., Mardhatil, M., Fazri, A. N., & Saputra, B. (2020). Dampak urbanisasi terhadap pemukiman kumuh (slum area). *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 60-69.